

---

---

## Ulama dan Politik di Arab Saudi: Perkembangan Kontemporer Dilema Konservatisme dan Modernitas: Tantangan Terkini bagi Ulama dan Politik di Arab Saudi

**M. Asvin Abdur Rohman<sup>1</sup> Moh. Hazim Ahrori<sup>2</sup> Ratna Pangastuti<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, [asvinwh@gmail.com](mailto:asvinwh@gmail.com)

<sup>2</sup> Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo, [haziminsuri@gmail.com](mailto:haziminsuri@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, [ratnauinsa@gmail.com](mailto:ratnauinsa@gmail.com)

---

Received: 08/11/2023

Revised: 09/11/2023

Accepted: 10/11/2023

---

### Abstract

This article discusses the dilemma of conservatism and modernity faced by clerics and politics in Saudi Arabia during the leadership era of Crown Prince Mohammed bin Salman. Since being appointed crown prince in 2017, Mohammed bin Salman has taken major reform policy steps to modernize and open Saudi Arabia to the outside world. However, these reform measures conflict with the conservative views held by many clerics in Saudi Arabia. Next, this article examines the position and role of the ulama in advancing the country and overcoming the challenges faced by Saudi Arabia today, as well as the ulama's response to the policies taken by the Crown Prince, in addition to discussing the reactions of conservative and modernist groups to the reform policies pursued by Mohammed bin Salman. The research results show that ulama have a significant role in state policy and many of them take a moderate attitude towards the reforms promoted by the Crown Prince. However, there are still groups of ulama who strongly criticize these policies. Finally, the general conclusion of this article is that the reforms promoted by Mohammed bin Salman can open up great opportunities for Saudi Arabia's progress, but the challenges of conservatism and modernity are still a dilemma that needs to be addressed wisely by the ulama and politics.

---

### Keywords

Konservatisme, Modernitas, Ulama, Politik, Arab Saudi

---

### 1. INTRODUCTION

Arab Saudi merupakan negara yang terkenal sangat konservatif dalam hal budaya dan tradisi keislaman, namun demikian dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Arab Saudi telah berusaha untuk mengubah penampilan negara menjadi lebih modern. Kebijakan reformasi social dan ekonomi yang diimplementasikan oleh pemerintah, termasuk pengangkatan Putra Mahkota Mohammed bin Salman sebagai pewaris tahta kerajaan pada tahun 2017, memunculkan berbagai perubahan dalam dinamika politik dan masyarakat di Arab Saudi. Perubahan yang dimunculkan oleh Mohammed bin Salman tidak terjadi tanpa tantangan, terutama dalam hubungan antara ulama dan politik di negara tersebut.

Negara Arab Saudi, sejak berdiri pada tahun 1932 para ulamanya telah memainkan peran



penting dalam politik dan masyarakat. Konservatisme agama dan budaya telah menjadi landasan penting bagi ulama dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah dan masyarakat Arab Saudi. Akan tetapi pada beberapa tahun terakhir ini sejak tahun 2017, Pemerintah Arab Saudi telah berusaha untuk mengubah paradigma politik dan sosial negara dengan memperkenalkan berbagai kebijakan modern. Salah satu kebijakan terpenting adalah program Vision 2030 yang dicanangkan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada tahun 2016, yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi pada minyak dan menciptakan ekonomi yang lebih diversifikasi serta lebih terbuka terhadap dunia luar. Namun demikian, kebijakan-kebijakan modern tersebut sering bertentangan dengan pandangan konservatif ulama yang menentang perubahan karena dinilai mengancam nilai-nilai Islam dan tradisi budaya Arab.

Sebagai bentuk catatan bahwa dilema permasalahan tentang konservatif dengan modernis ini, sebenarnya tidak hanya terjadi di Arab Saudi, tetapi juga di negara-negara Muslim lainnya seperti Iran, Turki, dan Indonesia<sup>1</sup> mengalami tantangan yang sama dalam menyeimbangkan nilai-nilai Islam dan modernitas dalam kebijakan politik dan sosial mereka. Melihat dinamika hubungan antara ulama dan politik di Arab Saudi, terdapat beberapa isu krusial yang perlu diperhatikan. Pertama, ulama dan politik harus dapat menemukan cara untuk merangkul perbedaan pandangan yang muncul dalam konteks perubahan sosial dan ekonomi<sup>2</sup>. Kedua, ulama dan politik harus memahami bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan, mereka memiliki tujuan yang sama dalam rangka menjaga stabilitas politik dan sosial di negara tersebut. Walaupun demikian, meski terdapat upaya untuk menemukan titik temu antara konservatisme dan modernitas, masih terdapat tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mempertahankan kestabilan politik dan sosial tanpa mengorbankan nilai-nilai Islam dan tradisi budaya Arab.

Artikel ini akan membahas tentang dilemma konservatisme dan modernitas dalam hubungan antara ulama dan politik di Arab Saudi, dan tantangan terkini yang dihadapi oleh keduanya.

## 2. METHODS

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode data sekunder terutama melalui studi literatur yang diperoleh dari jurnal atau artikel pendukung, serta berbagai berita yang selaras dengan kebutuhan artikel. Kajian pustaka merupakan alat yang sama pentingnya dengan penilaian kontekstual, dimana karya sastra sangat membantu dan membantu dalam memberikan konteks dan makna pada tulisan yang dibuat dan melalui penilaian

---

<sup>1</sup> James Toth, 2017, *Saudi Arabia's national Transformation Plan: Ambitions and Challenges*, Middle East Policy 24, no. 4, hal. 52-62

<sup>2</sup> Mehrzad Boroujerdi and Kouros Rahimkhani, *Introduction: The Politics of Islam and Modernity in Iran and the Arab World*, "Digest of Middle East Studies 25, no.

tersebut. mengetahui mengapa apa yang ingin dipelajari menjadi masalah untuk diteliti, baik dari segi subjek penelitian maupun bidang keilmuan yang terkait.

### **3. FINDINGS AND DISCUSSION**

Dalam konteks ini, ulama di Arab Saudi menghadapi dilemma antara konservatisme dan modernitas. Sebagai penjaga agama dan nilai-nilai tradisional, ulama sering berusaha mempertahankan konservatisme dalam memandang perkembangan sosial dan politik yang dinamis. Namun disisi lain, ulama juga dihadapkan pada tuntutan untuk memperbarui pemahaman agama dan memberikan jawaban atas tantangan zaman yang semakin kompleks. Sementara, politisi di Arab Saudi juga menghadapi dilema yang mirip dalam menghadapi perkembangan sosial dan politik dan dinamis. Kebijakan politik yang terlalu konservatif dapat menimbulkan ketegangan sosial dan merugikan kemajuan ekonomi negara. Disisi lain, kebijakan politik yang terlalu modern dan liberal juga dapat menimbulkan protes dari kelompok konservatif dan merusak stabilitas sosial dan politik.

Tantangan terkini yang dihadapi oleh ulama dan politik di Arab Saudi adalah terkait dengan reformasi sosial dan politik yang diusung oleh Pangeran mahkota Mohammed bin Salman. Reformasi ini meliputi reformasi ekonomi, sosial, dan politik yang bertujuan sebagaimana telah dijelaskan diawal yaitu untuk mengurangi ketergantungan negara terhadap minyak dan meningkatkan kemandirian ekonomi serta memperbaiki citra negara dalam kancah internasional. Namun, reformasi ini juga dihadapi oleh tantangan dari kelompok konservatif yang mempertahankan nilai-nilai tradisional dan memandang reformasi ini sebagai ancaman terhadap kestabilan sosial dan politik negara. Oleh karena itu, ulama dan politik di Arab Saudi perlu menghadapi dilemma antara konservatisme dan modernitas serta menemukan jalan tengah dalam menghadapi tantangan terkini yang semakin kompleks.

Reformasi sosial dan politik yang diusung oleh Pangeran Mahkota Mohammed bin Salman termasuk dalam program "Vision 2030" yang bertujuan untuk mewujudkan visi negara Arab Saudi sebagai negara yang lebih moderat dan terbuka secara sosial dan ekonomi. Program ini meliputi berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, budaya, pariwisata, dan sektor swasta. Kebijakan dalam bidang politik diantaranya liberalisasi sosial, pemilihan umum local, dan anti-korupsi, dapat mengguncang konservatisme sosial dan politik yang telah menjadi ciri khas negara Arab Saudi selama bertahun-tahun. Para kelompok konservatif yang didalamnya terdapat para ulama merasa khawatir tentang kemungkinan dampak hilangnya nilai-nilai tradisional dan perubahan yang terlalu cepat. Mereka menganggap bahwa perubahan-perubahan tersebut melanggar ajaran agama dan dapat mengancam stabilitas sosial dan politik Arab Saudi. Di sisi lain, kelompok moderat dan progresif, termasuk kaum muda dan wanita, memandang reformasi tersebut sebagai langkah positif menuju modernitas dan perubahan yang lebih baik. Akan tetapi mereka masih menghadapi banyak

kendala dan hambatan, termasuk hukum dan regulasi yang masih konservatif dan kurangnya kebebasan politik dan pers yang terbatas. Sehingga, dilema ini terus menjadi tantangan bagi ulama dan politik di Arab Saudi, khususnya dalam menghadapi tuntutan reformasi yang semakin kuat dan opini publik yang semakin terbuka. Untuk mengatasi hal ini diperlukan dialog dan kesepakatan yang lebih besar antara kelompok-kelompok yang berbeda dan dukungan yang lebih luas dari masyarakat.

Di tengah kompleksitas dilema ini, pemerintah Arab Saudi berusaha menavigasi tantangan tersebut dengan kebijakan-kebijakan yang dianggap seimbang antara konservatisme dan reformasi. Sebagai contoh, pemerintah telah memperkenalkan program visi 2030 yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak dan mempercepat pembangunan ekonomi. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal bahwa program dari Mohammad bin Salman ini menuai reaksi keras khususnya dari kalangan konservatif yang memandang bahwa reformasi ekonomi dan sosial membawa dampak negative bagi tradisi dan agama. Selain itu, beberapa kebijakan reformasi sosial, seperti pembebasan perempuan dan peningkatan kebebasan individu, juga memicu perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat.

Dalam hal ini, Ulama di Arab Saudi memiliki peran yang sangat penting karena mereka memiliki pengaruh yang kuat dalam menentukan pandangan masyarakat tentang perubahan dan reformasi. Seiring dengan perubahan yang terjadi, peran ulama sebagai pemimpin spiritual dan pemegang kebijakan semakin menjadi sorotan publik. Akhirnya tantangan yang dihadapi oleh ulama dan politik di Arab Saudi menuntut adanya dialog dan kerjasama antara berbagai kelompok yang berbeda, untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik dalam menghadapi perubahan dan tantangan di masa depan. Pentingnya dialog ini juga tercermin dalam upaya-upaya pemerintah untuk membangun dialog antara ulama dan masyarakat, seperti program penyuluhan keagamaan dan forum-forum diskusi.

Pada masa kepemimpinan Mohammed bin Salman, posisi ulama terus mengalami pergeseran. Sebagian ulama mendukung kebijakan modernisasi yang diambil oleh sang putra mahkota, namun sebagian lagi mengkritik keras kebijakan-kebijakan tersebut karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama Islam dan tradisi Arab yang konservatif. Sebagai contoh, kebijakan liberalisasi sosial seperti mengizinkan bioskop dan konser music mendapat dukungan dari sejumlah ulama yang melihatnya sebagai cara untuk meningkatkan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi kebijakan lain seperti perluasan hak-hak wanita dan penghapusan larangan mengendarai mobil bagi perempuan menuai kritik tajam dari sejumlah ulama yang melihatnya sebagai tindakan yang merusak nilai-nilai tradisional Arab Saudi dan ajaran agama Islam. Walaupun

demikian, Mohammed bin Salman tidak menyerah pada tekanan dari para ulama dan tetap menerapkan kebijakan-kebijakan modernisasi yang dianggapnya penting bagi masa depan Arab Saudi. Bahkan, pada tahun 2017 sang Pangeran mengambil langkah kontroversial dengan menangkap sejumlah ulama yang menentang kebijakan-kebijakan tersebut dan menempatkan mereka dalam tahanan. Tindakan ini menuai reaksi keras dari beberapa ulama di seluruh dunia Arab, termasuk dari sejumlah ulama di Mesir dan Yordania yang menuntut pembebasan pada ulama tersebut.

Tanggapan Mohammed bin Salman terhadap kelompok konservatif di Arab Saudi dapat dilihat dari beberapa kebijakan yang diambilnya, seperti membuka bioskop di Arab Saudi, mengizinkan perempuan untuk berkendara, membuka negara untuk pariwisata. Keberanian Mohammed bin Salman untuk mengambil kebijakan-kebijakan tersebut dianggap sebagai upaya untuk meruntuhkan hegemoni kelompok konservatif yang selama ini mengendalikan kehidupan masyarakat di Arab Saudi. Tentukan kelompok konservatif menolah keras kebijakan tersebut, karena merasa perubahan-perubahan tersebut melanggar nilai-nilai tradisional dan agama Islam, adapun beberapa ulama dan aktivis konservatif yang menentang kebijakan tersebut terindikasi dipenjara dan diasingkan. Selain upaya untuk membatasi kekuasaan para ulama, Mohammed bin Salman juga meluncurkan serangkaian reformasi sosial dan ekonomi yang dianggap oleh beberapa kalangan sebagai tindakan modernisasi yang signifikan di Arab Saudi. Pada tahun 2018, beliau meluncurkan program “visi 2030” yang bertujuan untuk mengubah ekonomi Arab Saudi yang sangat bergantung pada minyak menjadi lebih diversifikasi dan modern. Program “visi 2030” ini menjanjikan reformasi sosial yang signifikan, seperti memperbolehkan wanita mengemudi dan memberikann kebebasan sosial yang lebih besar bagi pendidik negara. Namun, lagi-lagi program “visi 2030” yang merupakan wujud dari reformasi tersebut menuai kritik dan oposisi dari kelompok konservaid di Arab Saudi, terutama berkaitan dengan liberalisasi sosial yang dianggap melanggar tradisi dan nilai-nilai Islam. Beberapa tokoh ulama bahkan menuduh Mohammed bin Salman sebagai pengkhianat agama dan memint agar dia digulingkan dari tahta. Di sisi lain, reformasi-reformasi tersebut juga mendapatkan dukungan dari kelompok muda dan progresif di negara tersebut yang ingin menyaksikan perubahan sosial dan ekonomi yang lebih besar.

Pada saat ini, terdapat pergeseran yang signifikan dalam pandangan masyarakat Arab Saudi tentang konservatisme dan modernitas. Beberapa kalangan masyarakat Arab Saudi terus menganggap konservatisme sebagai sumber stabilitas dan integritas masyarakat, sementara kelompok lain menganggap modernitas sebagai jalan menuju kemajuan dan perkembangan. Pergeseran ini tidak terjadi secara serta merta atau mudah, dan masih terdapat banyak kendala yang harus dihadapi. Salah satu kendala utama adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara

konservatisme dan modernitas, dan bagaimana mengatasi ketegangan yang muncul dari perbedaan pandangan tersebut. Selain itu, ada tugas besar yang harus dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi dalam mengembangkan ekonomi, mempromosikan inovasi dan pendidikan, serta memperbaiki hak asasi manusia dan demokrasi. Terlepas dari kendala tersebut, perubahan besar sedang terjadi di Arab Saudi di bawah kepemimpinan Mohammad bin Salman, dengan mengusung visi “Saudi Arabia yang Moderat, Terbuka, dan Islamis”. Kendati masih ditemui adanya pro dan kontra, akan tetapi banyak kalangan yang menyambut positif perubahan ini. Harapan besar ditujukan pada masa depan Arab Saudi yang lebih maju, terbuka, dan stabil di bawah kepemimpinan Mohammed bin Salman.

Adapun tanggapan kelompok konservatif terhadap kebijakan Mohammed bin Salman yang progresif cukup bervariasi. Beberapa kelompok konservatif menolak reformasi yang dilakukan oleh pemerintah dan menganggapnya sebagai ancaman bagi tradisi dan kestabilan sosial. Beberapa juga merasa bahwa reformasi tersebut terlalu cepat dan tidak mempertimbangkan akar budaya dan agama negara tersebut. Namun, ada juga kelompok konservatif yang mendukung reformasi, meskipun dalam tingkatan yang lebih moderat. Mereka melihat kebijakan progresif sebagai langkah penting untuk meningkatkan ekonomi dan menghadapi tantangan global. Sementara itu, kelompok modernis umumnya mendukung kebijakan reformasi yang dilakukan oleh Mohammed bin Salman dan melihatnya sebagai langkah maju dalam memodernisasi negara. Namun, ada beberapa kritik disampaikan terhadap metode yang digunakan oleh pemerintah dalam mengimplementasikan reformasi. Beberapa menilai bahwa metode tersebut terlalu otoriter dan mengabaikan partisipasi public yang lebih luas dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam konteks ini, perdebatan antara konservatif dan modernis tetap berlangsung dan memperlihatkan adanya ketegangan antara keinginan untuk memodernisasi negara dan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai konservatif. Namun, seiring dengan semakin kuatnya pengaruh progresif di Arab Saudi di bawah pemerintah Mohammed bin Salman, tampaknya kecenderungan umumnya adalah mendukung kebijakan modernis. Sebenarnya pada masa pemerintahan Mohammed bin Salman, ulama masih memegang posisi penting dalam struktur kekuasaan di Arab Saudi, namun peran dan pengaruh para ulama tersebut telah mengalami pergeseran dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. *Tidak semua ulama menentang reformasi tersebut.* Ada sekelompok ulama yang mendukung upaya modernisasi dan reformasi yang dilakukan oleh Mohammed bin Salman, kelompok ulama ini termasuk ulama-ulama muda yang dibesarkan dalam lingkungan yang lebih terbuka dan berpengalaman dalam berinteraksi dengan dunia luar. Pada sisi lainnya, ada kelompok konservatif yang merasa keberatan dengan adanya reformasi ini

dan merasa bahwa reformasi ini dapat mengancam kestabilan sosial dan keagamaan di Arab Saudi. Adapun kelompok ulama konservatif ini termasuk beberapa ulama senior yang memiliki pengaruh kuat di kalangan masyarakat Arab Saudi. Namun demikian, secara keseluruhan posisi ulama dalam pemerintahan Mohammed bin Salman masih relative kuat meskipun pengaruh mereka sedikit tergerus. Mereka masih memiliki kekuatan uajg signifikan dalam mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap isu-isu sosial dan keagamaan, meskipun pengaruh mereka dalam keputusan politik mungkin tidak sebesar sebelumnya.

Mohammed bin Salman seorang visioner yang luar biasa, beliau mempunyai ambisius untuk membawa Arab Saudi menuju kemajuan dan modernisasi yang lebih besar. Beberapa dari inisiatifnya adalah dengan program reformasi ekonomi yang disebut "visi 2030" sebagaimana telah dibahas di atas, penciptaan NEOM, yaitu sebuah kota futuristic yang dijadwalkan akan dibangun di dekat Laut Merah, dan reformasi sosial seperti mengizinkan perempuan untuk mengemudi dan menghapus larangan untuk bioskop dan konser music. Dalam melaksanakan program kebijakan reformasi ini, Mohammed bin Salman memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang memperoleh dukungan dari kalangan modernis, seperti pengurangan peran Komite untuk Amal Ma`ruuf dan Nahy `An Al-Munkar (Komite untuk Mencegah Perbuatan Kejahatan dan Mungkar) yang dipandang oleh sebagian kalangan konservatif sebagai tangan pemerintah dalam membatasi kegiatan keagamaan di masyarakat.

NOEM (New Future) merupakan sebuah mega proyek pembangunan kota masa depan di wilayah barat laut Arab Saudi, yang diumumkan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman pada tahun 2017. Proyek NEOM ini diharapkan menjadi pusat ekonomi, teknologi, pariwisata, dan energy terbesar di dunia, dengan menciptakan ribuan lapangan kerja, meningkatkan kualitas hidup penduduk, dan meningkatkan perekonomian negara secara signifikan. Proyek ini di rencanakan mencakup area seluas 26.500 kilometer persegi, dengan investasi awal sebesar 500 miliar dolar AS. Proyek NEOM akan menjadi zona ekonomi khusus dengan aturan dan regulasi sendiri yang berbeda dengan daerah lain di Arab Saudi, yang memiliki tujuan menarik investor dan perusahaan asing dalam proyek ini.

Beberapa data signifikan tentang kemajuan Arab Saudi dibawah kepemimpinan Mohammed bin Salman adalah sebagai berikut:

1. Saudi Vision 2030: pada tahun 2016, Pangeran Mohammed bin Salman memperkenalkan Saudi Vision 2030, sebuah rencana yang bertujuan untuk membawa negara tersebut kearah ekonomi yang lebih beragam dan berorientasi ke masa depan. Rencana ini termasuk reformasi ekonomi, peningkatan investasi dalam sector non-minyak, dan peningkatan lapangan kerja.

2. Pembukaan bagi turis: Arab Saudi juga memperkenalkan visa pariwisata untuk pertama kali pada tahun 2019, membuka pintu bagi wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat seperti kota suci Mekah dan Madinah
3. Pembangunan infrastruktur: Arab Saudi sedang dalam proses pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang besar, termasuk pembangunan NEOM, kota baru yang diharapkan menjadi pusat teknologi dan inovasi di Timur Tengah.
4. Peningkatan hak-hak perempuan: pemerintahan Mohammed bin Salman juga telah memperkenalkan beberapa reformasi sosial termasuk mengizinkan perempuan untuk mengemudi dan masuk ke dalam stadion olahraga pertama kali.
5. Peningkatan indeks kemudahan bisnis: Arab Saudi mendapatkan peringkat yang lebih tinggi dalam indeks kemudahan berbisnis Dunia Bank pada tahun 2020, karena upaya pemerintah untuk menyederhanakan proses perizinan dan regulasi.

Adapun dalam pembahasan artikel ini mempunyai novelty pada focus dan dilemma yang dihadapi oleh kelompok konservatif dan modernis dalam upaya memajukan negara Arab Saudi dibawah kepemimpinan Mohammed bin Salman. Selain itu, artikel ini membahas bagaimana kebijakan-kebijakan baru yang diperkenalkan oleh pemerintah Arab Saudi memengaruhi hubungan antara ulama dan politik di negara tersebut. Dan yang terakhir membahas peran dan posisi ulama dalam upaya memajukan negara dan mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Arab Saudi saat ini.

Berdasarkan pembahasan dalam artikel tersebut, dapat dimunculkan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Pemerintah Arab Saudi perlu mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat system pendidikan di negara tersebut. Hal ini membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan masa depan.
2. Dalam upaya memajukan negara, pemerintah Arab Saudi perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk ulama dan kelompok konservatif. Mereka dapat memberikan masukan dan saran yang berharga dalam pengambilan kebijakan.
3. Pemerintah Arab Saudi perlu terus mendorong investasi dalam sector-sektor strategis seperti energy, teknologi, dan pariwisata. Hal ini dapat membuka lapangan kerja baru dan membantu diversifikasi ekonomi negara.

4. Pemerintah Arab Saudi perlu menjaga keseimbangan antara kemajuan dan konservatisme. Meskipun perubahan dan inovasi sangat penting untuk kemajuan negara, namun hal ini juga harus dilakukan dengan memerhatikan nilai-nilai dan budaya local.
5. Dalam upaya memajukan negara, pemerintah Arab Saudi perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan hubungan dengan negara-negara lain di dunia, terutama di bidang perdagangan dan investasi. Hal ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dan memperkuat posisinya di tingkat global.

#### **4. CONCLUSION**

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tantangan terkini yang dihadapi oleh konservatisme dan modernitas mencakup perubahan sosial dan ekonomi, dan kebijakan reformasi yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi, namun demikian upaya pemerintah untuk mencapai tujuan reformasi tersebut harus diimbangi dengan mempertahankan hubungan yang baik dengan ulama, dan merangkul mereka dalam proses perubahan.

Penyeimbangan antara nilai-nilai Islam dan modernitas bukan hanya menjadi isu di Arab Saudi, tetapi juga di negara-negara Muslim lainnya misalnya Iran, Turki, dan Indonesia.

Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Mohammed bin Salman dalam rangka mendorong kemajuan Arab Saudi memiliki dampak yang signifikan terhadap kedudukan ulama dan dinamika politik di negara tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut terutama mengarah pada modernisasi dan liberalisasi dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang sosial, budaya, dan ekonomi.

Kebijakan-kebijakan yang dimunculkan oleh Mohammed bin Salman juga menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan masyarakat dan ulama, antara kelompok konservatif dan modernis. Kelompok konservatif cenderung mempertahankan tradisi dan nilai-nilai konservatif yang telah diakui oleh masyarakat, sementara kelompok modernis berusaha mendorong perubahan dan kemajuan melalui terobosan baru dalam berbagai bidang.

Dinamika hubungan ulama dan politik di Arab Saudi tetap kompleks dan masih terus berubah-ubah seiring dengan perkembangan zaman, sehingga diperlukan upaya-upaya yang terus menerus untuk mempertahankan keseimbangan antara konservatisme dan modernitas, serta mengatasi perbedaan pandangan dan kepentingan di kalangan masyarakat dan ulama untuk mencapai kemajuan yang berkelanjutan bagi negara dan masyarakat Arab Saudi.

## REFERENCES

- Al-Hebaishi, F, 2018, *Vision 2030 and Social Transformation in Saudi Arabia*. Middle East policy, 25 (2), 102-114
- Alkhathlan, K, 2020, *The Vision 2030 of Saudi Arabia: a review*. Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences, 19 (1), 1-7
- Al Jazeera, 2018 June 24, *The Saudi Women divorced by their husbands via text message*, <https://www.aljazeera.com/news/2018/6/24/the-saudi-women-divorced-by-their-husbands-via-text-message>.
- Al-Tamimi, N, 2018, *The Saudi Arabian Religious Elite (Ulama) and the State's Relations with the Muslim Brotherhood*. Digest of Middle East Studies, 27 (2), 292-312
- Al-Rasheed, M, 2018, *The Politics of Saudi Arabia: Between Fragmentation and Stability*. Cambridge University Press
- Al-Rasheed, M, 2018, *MBS: Reform, Revolution, and Power in Saudi Arabia*. Hurst Publishers
- Al-Saud, M.F, 2018, *Domestic and Foreign Policy Changes in Saudi Arabia under King Salman dan Crown Prince Muhammad bin salman: Two Sides of the Same Coin*, Middle East Institute, Policy Paper no. 30,
- Al-Saud, T.F, 2019, *Crown Prinnce Mohammed Bin Salman's Saudi Arabia: A Revolution under Siege*. Columbia Global Reports.
- ALSharif, F, Z, & Gaur, S, 2021, *Unnderstanding the Rise of NEOM: A Perspektive on Vision 230 and Saudi Arabia's Diversification Strategy*. Journal of Middle Eastern and Islamic Studies (in Asia), 15 (1), 31-47
- Al-Sudairi, M.A, 2020, *The Role of the Saudi Religious Establishment in the Era of Vision 2030*, Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(2), 1225-1242
- Barmada, K.A., & Al0Harthi, F.A., 2019, *Vision 2030 for Saudi Arabia: Opportunities and Challenges*. Journal of King Saud University-Engineering Sciences, 31(3), 249-256
- BBC News, 2018, Januari 12, *Saudi Arabia Allows Women to Attend Football Matches*, <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-42651548>
- Brown, N.J, 2018, *The Myth of the Authoritarian Model: Saudi Arabia's Political Future*, Foreign Affairs, 97(4), 74-84
- Cavatorta, F, 2019, *The Politics of Reform in Saudi Arabia: The Quest for Political Change and Reform*, Routledge
- Davidson, C, 2019, *The Saudi Paradox: The role of the ulema in the age of MBS*, Brookings Institution Press
- Kamrava, M, 2018, *Saudi Arabia's Modernization: Between Continuity and Change*. Journal of Arabian Studies, 9 (2-3), 139-15
- Lacroix, S, 2019, *Political Changes in Saudi Arabia: The Centralization of Power and the Marginalization of the Ulama*. Digest of Middle East Studies, 28 (2), 259-276
- Madawi, A, 2020, *The Limmits of Change: The crown Prince and the Strucutre of Power in Saudi Arabia*, Oxford University Press.
- The Guardian, 2018, April 4, *Saudi Arabia's Bin salman 'has the Support of Most Young Saudis'*. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2018/apr/4/saudi-arabia-crown-prince-mohammed-bin-salman-most-young-saudis-support-him>

The Guardian, 2018 April 24, *Saudi Arabia to Open Up to Foreign Tourists Under Relaxed New Visa Rules*, <https://www.theguardian.com/world/2018/apr/24/saudi-arabia-to-open-up-to-foreign-tourists-under-relaxed-new-visa-rules>

The New York Times, 2018 April 18, *Saudi Arabia's First Movie Theater in Decades Opens With Black Panther*, <https://www.nytimes.com/2018/04/18/world/middleeast/saudi-arabia-cinema-black-panther.html>